

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum**

##### **4.1.1 Sejarah Perusahaan**

Indonesia memiliki sejarah lampau yang selama ini dikenal sebagai negara maritim. Di masa lalu, kerajaan maritim seperti Sriwijaya, Majapahit dan kerajaan di Maluku memegang peranan kunci dalam jalur perdagangan dunia melalui komoditas rempah-rempah. Pedagang dari Gujarat dan China mengumpulkan rempah-rempah dari Kepulauan Maluku dan mengirimkannya melalui jalur perdagangan yang melibatkan kapal-kapal menuju berbagai tujuan seperti Cina, Semenanjung Arab, Eropa dan Madagaskar. Pelabuhan kecil di Indonesia menjadi pusat pertemuan dan perdagangan dari berbagai bangsa, menciptakan pusat-pusat perdagangan yang besar. Latar belakang ini menjadi dasar pembentukan Pelabuhan Indonesia pada masa kemerdekaan.

Sebelumnya, untuk mengelola fasilitas pelabuhan di Indonesia, terdapat 4 (empat) perusahaan Pelindo yang dibentuk berdasarkan pembagian wilayah. Misalnya, Pelindo I mengelola pelabuhan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau. Pembentukan Pelindo I didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 1991, dan pendirian resminya diakui melalui Akta Notaris No.1 tanggal 1 Desember 1992.

Pelindo II bertanggung jawab atas pelabuhan di wilayah Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Pelindo II didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 1991, dan Akta Notaris Imas Fatimah SH, No.3, tanggal 1 Desember 1992.

Pelindo III mengoperasikan pelabuhan di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Pelindo III dibentuk sesuai dengan

Akta Notaris Imas Fatimah, SH No.5 tanggal 1 Desember 1992, dan didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 1991.

Pelindo IV mengoperasikan pelabuhan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Pelindo IV didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.59 Tanggal 19 Oktober 1991 dan diresmikan melalui Akta Notaris Imas Fatimah, SH no,7 tanggal 1 Desember 1992.

Masing-masing perusahaan Pelindo memiliki cabang dan anak perusahaan untuk mengelola operasional bisnisnya. Pelindo I, II, III, IV merupakan Perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Kementerian BUMN sebagai pemegang saham negara Republik Indonesia. Sebagai akibatnya, tidak terdapat pemegang saham utama atau pengendali individu di Pelindo. Pemegang saham tunggal merupakan Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.

Pada tanggal 1 Oktober 2021, secara hukum terjadi penggabungan antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2021. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berperan sebagai entitas bisnis yang terus menjalankan kegiatan operasional. Selanjutnya, sesuai Surat Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Republik Indonesia No. S-756/MBU/10/2021 yang ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2021 tentang Persetujuan Perubahan Nama, Perubahan Anggaran Dasar dan Logo Perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) mengubah namanya menjadi “PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau disingkat Pelindo”.

Proses penggabungan perusahaan Pelindo sudah direncanakan sejak lama. Tahap awal dilaksanakan tahun 2009, langkah pertama dilakukan dengan merancang analisis Holding Pelabuhan dan Pengerukan. Kemudian, pada tahun 2012 dilaksanakan Analisis Integrasi Pelindo I, II, III, dan IV.

Studi Pelabuhan Indonesia Holding dan pembentukan PT Terminal Petikemas Indonesia juga dilakukan pada tahun 2013. Pada tahun 2016, dibentuk PMO Nasional dan diikuti dengan penyusunan studi Pelindo Incorporated, yang bertujuan untuk menggabungkan anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) yang memiliki fokus bisnis serupa. Pada tahun 2017 inisiasi Pembentukan Holding Maritim dilakukan dan pada tahun 2018 dilakukan studi Integrated Port Network yang mengidentifikasi 7 (tujuh) Hub Pelabuhan RJPMN, Inisiasi Pembentukan Subholding Petikemas dilaksanakan pada tahun 2019.

Langkah selanjutnya ialah pembentukan Tim Percepatan Peningkatan Sinergi dan Integrasi Badan Usaha Milik Negara dalam Layanan Pelabuhan oleh Kementerian BUMN pada bulan Desember 2019 yang tertulis dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-311/MBU/12/2019. Langkah ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk meningkatkan konektivitas perdagangan dengan tujuan mengurangi biaya logistik nasional. Keputusan ini kemudian diperbarui dalam Keputusan Menteri BUMN No. SK-83/MBU/Wk2/11/2020 tanggal 13 November 2020 dan Keputusan Menteri BUMN No. SK-33/MBU/Wk2/03/2021 tanggal 29 Maret 2021. Kementerian BUMN memiliki inisiatif untuk melakukan konsolidasi BUMN dalam Layanan Kepelabuhanan, dengan tujuan agar penataan tidak didasarkan pada wilayah dan untuk menciptakan konektivitas maritim yang optimal dengan kawasan strategis di seluruh Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan investasi BUMN dalam layanan pelabuhan, menciptakan jaringan transportasi laut yang efektif, dan memberikan pelayanan berkualitas dengan dukungan infrastruktur kepelabuhanan yang memadai. Konsep ini direalisasikan melalui penyusunan Kajian Sinergi dan Integrasi BUMN Pelabuhan yang menghasilkan desain penggabungan keempat perusahaan Pelindo pada tahun 2020.

#### **4.1.2 Visi Misi Perusahaan**

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memiliki Visi untuk menjadi pemimpin dalam ekosistem maritim yang terintegrasi dan standar internasional. Visi ini bertujuan untuk menjadikan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai gerbang utama dalam jaringan logistik global di Indonesia. Pandangan ini didasarkan pada letak geografis yang strategis, peluang bisnis yang tersedia, serta arahan kebijakan nasional yang membuka jalan bagi perusahaan untuk mewujudkan visi tersebut.

Sementara itu, Misi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ialah untuk mewujudkan lingkungan ekosistem maritim dalam upaya meningkatkan koneksi jaringan dan menyatukan pelayanan. Ini bertujuan untuk memberikan dukungan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perusahaan berkomitmen untuk menyajikan layanan pelabuhan dan kelautan yang handal, serta mengintegrasikan diri dengan wilayah industri guna menopang rangkaian logistik nasional dan global. Semua ini dilakukan dengan memaksimalkan manfaat ekonomi yang berasal dari Selat Malaka.

#### **4.1.3 Budaya Perusahaan**

Untuk mewujudkan perannya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pilar peningkat kesejahteraan sosial, dan penyedia peluang pekerjaan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menetapkan prinsip utama (Core Values) sebagai ciri khas dan pengikat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Berikut prinsip utama perusahaan yang diterapkan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero):

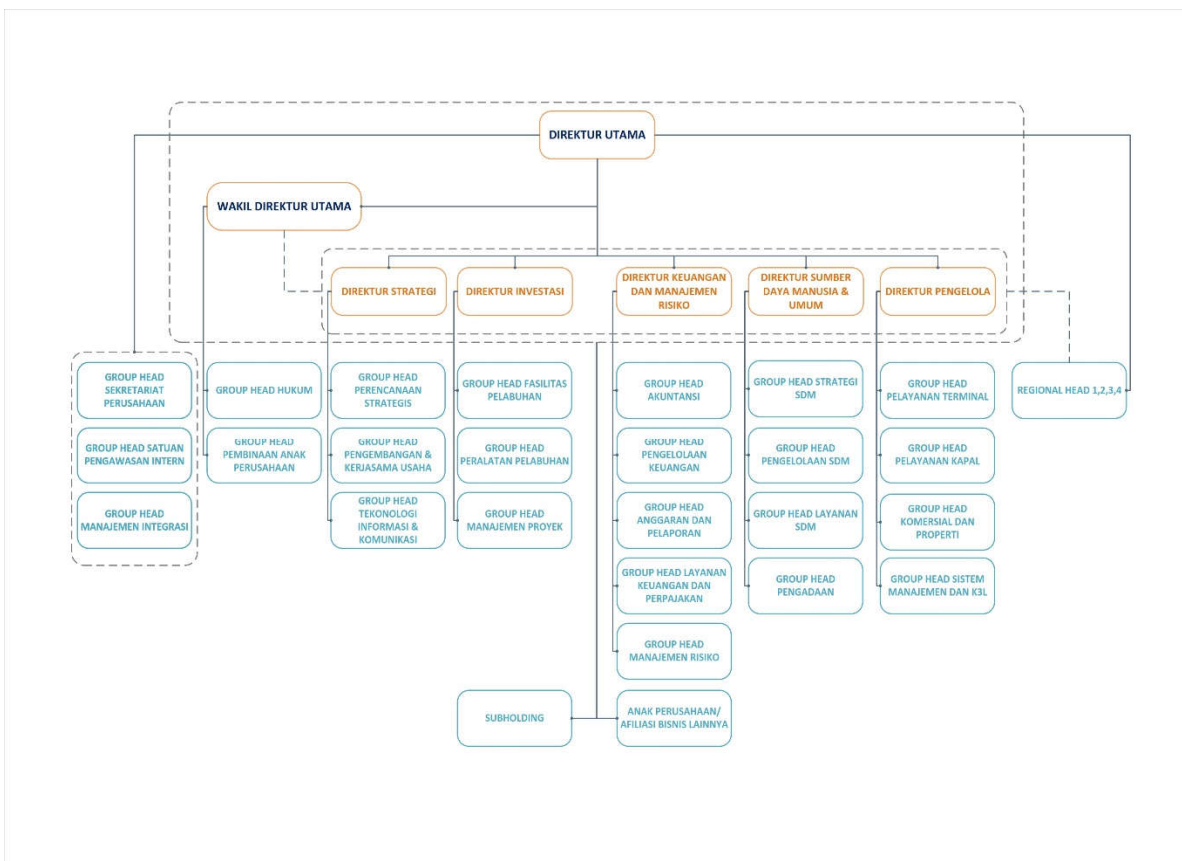
1. Amanah = Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
2. Kompeten = Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
3. Harmonis = Saling peduli dan menghargai perbedaan.
4. Loyal = Berdedikasi dan Mengutamakan Kepentingan Bangsa dan Negara
5. Adaptif = Terus Berinovasi dan Antusias dalam Menggerakkan ataupun Menghadapi Perubahan.
6. Kolaboratif = Membangun kerjasama yang sinergis.

#### **4.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan**

Sebagai perusahaan induk, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan berperan sebagai perancang strategi utama yang dibantu oleh koordinator regional, sedangkan sub-holding akan menjadi pemilik bisnis sesuai dengan klaster bisnisnya. Dibawah ini merupakan struktur organisasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai tempat dimana pemegang saham bertemu untuk mengambil keputusan mengenai arah perusahaan. Ini juga berfungsi sebagai forum bagi dewan komisaris dan direksi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kinerja kepada pemegang saham. RUPS sebagai lembaga tertinggi di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan tempat di mana pemegang saham dapat mengambil keputusan penting yang tidak dipegang oleh dewan direksi dan dewan komisaris, sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RUPS diadakan melalui proses pengumuman dan undangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Dewan komisaris sebagai organ PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang memiliki tugas mengawasi kebijakan manajemen, operasional umum dan memberikan nasihat kepada direksi untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan sasaran PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Sebagai pengawas dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Sekretariat Dewan Komisaris dan satu komite lain, jika memang dipandang perlu.
3. Direksi sebagai organ Perusahaan yang bertanggungjawab memastikan kegiatan pengelolaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) termasuk strategi perusahaan, pengawasan internal, kegiatan sekretaris perusahaan, operasi komersial, aspek teknik, operasi, keuangan, sumber daya manusia (SDM), transformasi, pengembangan bisnis berjalan dengan efisien dan efektif, serta sesuai prinsip GCG. Direksi juga menjadi representasi perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Mereka terus melaksanakan

pengelolaan usaha serta melindungi kekayaan perusahaan, mengelola strategi, dan rencana anggaran secara teratur. Secara khusus, direksi terus menerapkan strategi yang telah ditetapkan untuk mencapai visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan rencana perjalanan perusahaan. Direksi juga memastikan bahwa semua elemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) bekerja sejalan dengan nilai-nilai perusahaan secara konsisten.



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero)**

#### 4.1.5 Bidang Usaha Perusahaan

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ialah entitas bisnis yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia, yang fokus pada sektor logistik dengan penekanan pada pengelolaan dan pertumbuhan infrastruktur pelabuhan. Saat ini, aktivitas inti PT Pelabuhan Indonesia (Persero) meliputi hal-hal berikut :

1. Layanan Barang : PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menyediakan layanan berupa bongkar muat barang, dimulai dari proses kapal merapat

hingga barang diserahkan kepada pemiliknya. Layanan ini meliputi dermaga umum, dermaga khusus, lapangan, dan gudang, yang telah diatur dalam peraturan hukum. Pelaksanaannya melibatkan anak perusahaan, dan perusahaan ini menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk mengelola layanan barang dengan menggunakan fasilitas berikut:

- a. Dermaga: Struktur khusus di pelabuhan untuk sandar kapal dan kegiatan bongkar muat barang dan penumpang.
  - b. Gudang Penumpukan: Tempat tertutup untuk menyimpan barang dari atau menuju kapal.
  - c. Lapangan Penumpukan: Area terbuka dalam terminal untuk menumpuk petikemas atau barang lain, sebelum atau setelah bongkar muat kapal.
  - d. Penerimaan atau Pengiriman: Proses memindahkan barang di gudang atau lapangan penumpukan ke atau dari kendaraan di pintu gudang atau lapangan penumpukan.
2. Layanan Kapal : PT Pelabuhan Indonesia (Persero) juga menyediakan layanan operasional kapal, termasuk:
- a. Jasa tambat: Jasa menyediakan bantuan sandar kapal di dermaga untuk bongkar muat barang.
  - b. Jasa pandu: Jasa mengarahkan kapal masuk dan keluar pelabuhan dengan aman dan lancar.
  - c. Jasa tunda: Jasa mendorong atau menarik kapal menuju atau keluar dari dermaga.
  - d. Jasa pelayanan air, sampah, dan limbah: Menyediakan layanan air, mengelola sampah dan limbah kapal.
3. Layanan Rupa-Rupa: Selain operasi pelabuhan, Pelindo juga terlibat dalam aktivitas lain seperti penyewaan tanah, bangunan, dan fasilitas pendukung relevan. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menjalin KSMU (Kerja Sama Mitra Usaha) dengan mitra dari sektor swasta, seperti operator terminal, kapal tunda, dan pengelola fasilitas pelabuhan lainnya. Layanan rupa-rupa mencakup:

- a. Pas Pelabuhan: Biaya masuk area pelabuhan untuk individu dan kendaraan bermotor.
- b. Jasa Pemeliharaan Alat-alat Pelabuhan: Menyewakan peralatan pelabuhan seperti forklift, kran (darat, apung dan listrik), kapal tunda, motor boat, serta alat pemadam kebakaran
- c. Jasa Penyewaan Tanah, Bangunan, Air, dan Listrik: Menyediakan layanan penyewaan lahan, bangunan, air bersih dan listrik.

#### **4.1.6 Struktur Organisasi dan Kewenangan di Unit Kerja SSC (*Shared Service Center*) Procurement**

Unit Kerja *SSC (Shared Service Center) Procurement* berada dibawah Direktur Sumber Daya Manusia dan Group Head Layanan Sumber Daya Manusia yang dipimpin oleh *SSC Lead*. Pada prinsipnya proses pemilihan penyedia dilaksanakan oleh Unit Kerja *SSC (Shared Service Center) Procurement* sebagai Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *SSC Lead* sebagai ketua unit *SSC (Shared Service Center)*;
2. *Procurement Service Head* sebagai wakil ketua unit *SSC*;
3. *Source to Contract Team Lead 1* sebagai anggota unit *SSC*;
4. *Source to Contract Team Lead 2* sebagai anggota unit *SSC*;
5. *Procure to Order Team Lead* sebagai anggota unit;
6. *Source to Contract Team Member* sebagai anggota unit *SSC*;

Dalam pelaksanaan penyediaan barang dan jasa, Unit kerja *SSC (Shared Service Center) Procurement* mempunyai 3 (tiga) kelompok kerja yang berbeda dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab tugas berikut:

1. *Procurement Support*
  - a. Melakukan evaluasi (verifikasi, klarifikasi dan konfirmasi) terhadap pelaku usaha untuk menjadi pelaku usaha terseleksi.
  - b. Melakukan evaluasi terhadap permohonan *Blacklist* penyedia.
  - c. Membuat dan memberitahukan daftar hitam kepada kantor pusat, regional, subholding, dan anak perusahaan serta pelaku usaha terseleksi yang masuk daftar hitam.



- d. Membuat laporan atas setiap proses pemilihan penyedia maupun atas seluruh proses yang sedang dan sudah dilaksanakan secara periodik kepada Direktur Penyelenggara.
- e. Menyimpan dan mengadministrasikan dokumen proses pemilihan penyedia.
- f. Memonitor penyelesaian pembuatan addendum kontrak yang dilakukan oleh unit pengguna.
- g. Monitoring penilaian penyedia oleh pengguna.
- h. Penilaian penyedia pada saat proses pemilihan.

## 2. *Source to Contract*

- a. Memilah permintaan pemilihan penyedia yang masuk berdasarkan kriteria barang dan jasa dan mengalokasikan unit penyelenggara pengadaan yang akan melaksanakan pemilihan penyedia berdasarkan hasil pemilihan.
- b. Melaksanakan proses pemilihan penyedia yang menjadi kewenangannya.
- c. Melakukan evaluasi teknis untuk pekerjaan kuantitatif.
- d. Verifikasi *e-Catalogue* dan pembuatan kontrak katalog.
- e. Pembuatan kontrak.

## 3. *Procure to Order*

- a. Validasi kelengkapan dokumen purchase requisition pada worklist.
- b. Validasi kelengkapan persyaratan dokumen permintaan pengadaan.
- c. Penerbitan *purchase order* atau *outline agreement*.

Anggota Penyelenggara berjumlah gasal, beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami substansi pekerjaan yang bersangkutan yang dibentuk menjadi panitia untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi yang berlaku selama periode tertentu.

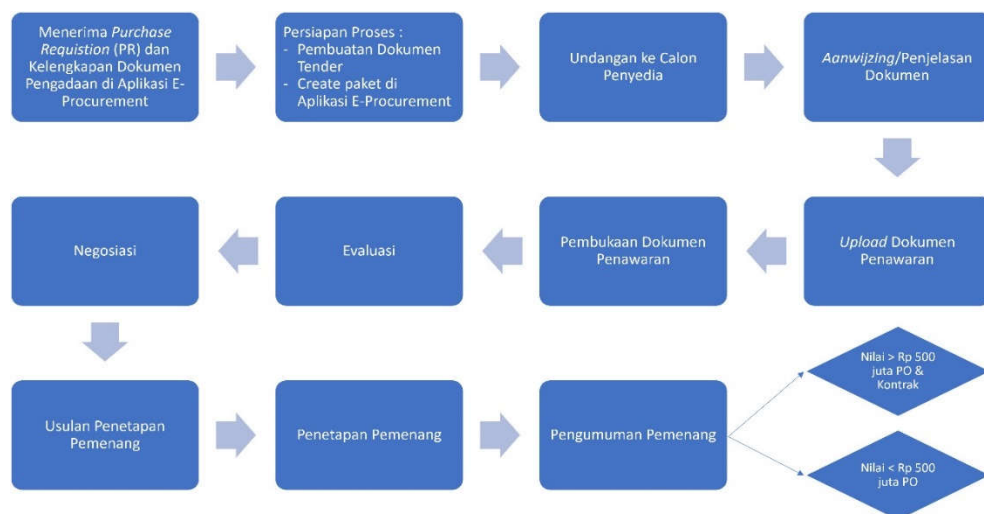
Penyelenggara atau *Person in Charge (PIC)* harus memiliki integritas moral, disiplin tinggi, tanggung jawab, dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, memiliki

kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).

Pada proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Grup terbagi menjadi 2 (dua) yaitu proses pengadaan di *SSC (Shared Service Center) Procurement* dilakukan untuk anggaran *Opex* (Pemeliharaan) sedangkan proses pengadaan barang dan jasa untuk anggaran *Capex* (Investasi) dan jasa konsultan adalah di masing-masing Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Subholding.

#### 4.1.7 Aplikasi *E-procurement Secure*

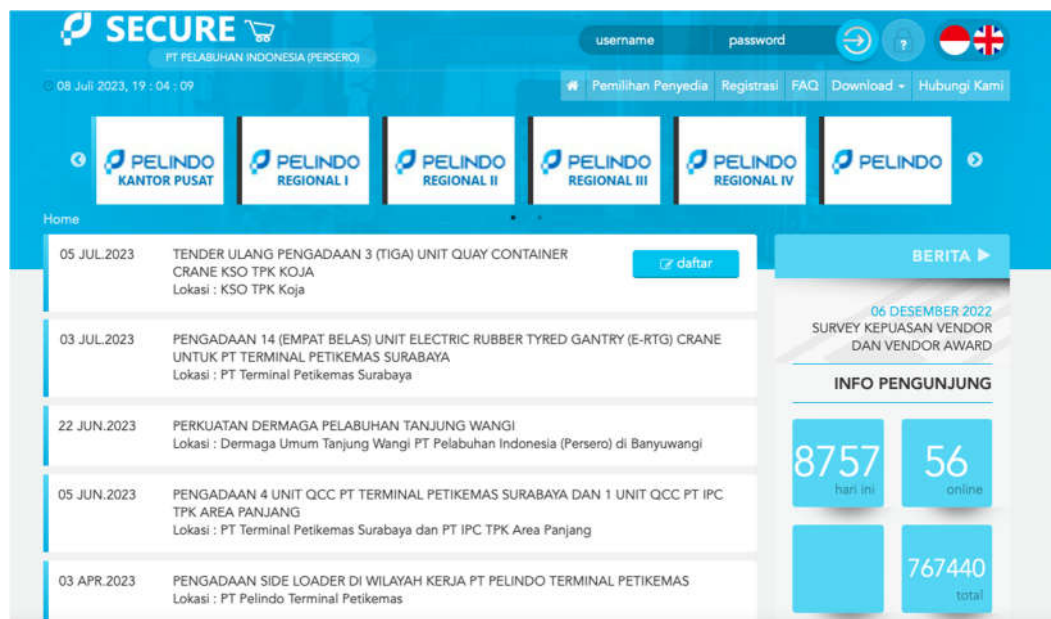
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dimulai pada saat tim *SSC (Service Shared Center) Procurement* menerima PR (*Purchase Requisition*) di aplikasi Centra. Unit *SSC (Service Shared Center) Procurement* akan memastikan kelengkapan dokumen PR (*Purchase Requisition*) kemudian menentukan metode pengadaan barang dan jasa yang akan digunakan. Setelah itu PR (*Purchase Requisition*) di teruskan ke aplikasi *Secure*. Selanjutnya, dilakukan proses pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi *Secure* melalui website [secure.pelindo.co.id](http://secure.pelindo.co.id). Semua proses dari awal pendaftaran maupun undangan sampai dengan pengumuman pemenang dilaksanakan secara online. Berikut alur prosesnya :



Gambar 4. 1 Alur Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Proses penyediaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dilakukan melalui aplikasi *Secure*. Pengguna dapat mengakses aplikasi *Secure* dengan menggunakan *browser* seperti *Mozilla Firefox* atau *Google Chrome* dan kemudian mengakses situs web [secure.pelindo.id](https://secure.pelindo.id). Terdapat beberapa menu pada aplikasi *Secure* antara lain sebagai berikut:

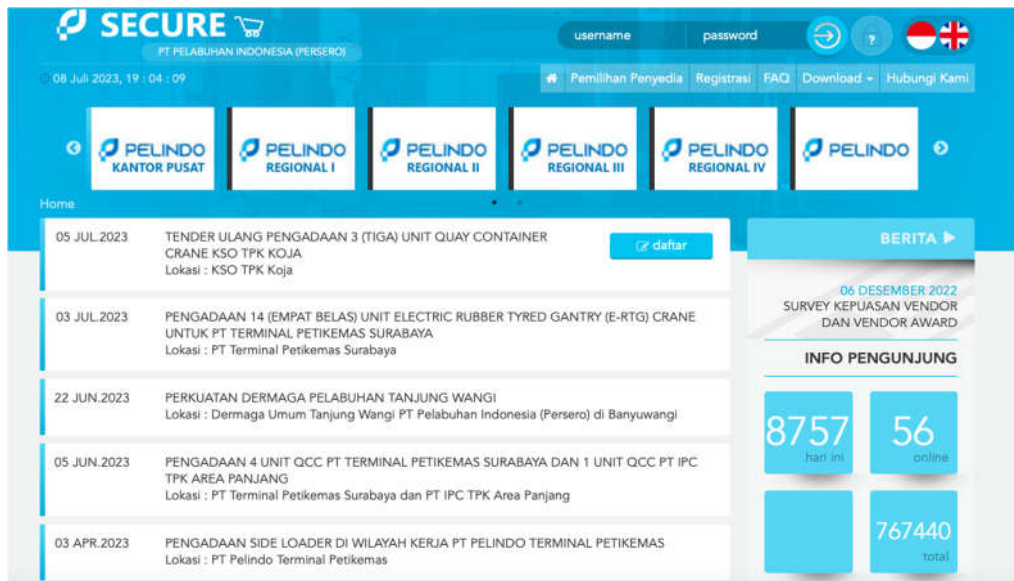
1. Home
2. Pemilihan Penyedia
3. Registrasi
4. FAQ
5. Download
6. Hubungi Kami



**Gambar 4.3 Halaman Utama *Secure* (2023)**

#### 1. Home

Menu *home* ini berfungsi untuk memperlihatkan tampilan awal aplikasi *Secure*. Pada tampilan *home* terdapat informasi seperti daftar paket lelang yang telah diumumkan, berita terbaru dan formulir untuk masuk ke dalam aplikasi. Tampilan *home* seperti berikut :



**Gambar 4.4 Tampilan Menu Home Aplikasi Secure (2023)**

Menu *home* juga menyajikan formulir *login* pengguna, dimana pengguna dapat memasukkan *username* dan kata sandi sesuai dengan yang telah terdaftar sebelumnya. Berikut ialah contoh formulir masuk untuk pengguna dalam mengakses aplikasi *Secure*.



**Gambar 4.5 Tampilan Form User Login (2023)**

## 2. Pemilihan Penyedia

Pada menu pemilihan penyedia ini terdapat paket lelang atau daftar-daftar paket yang diumumkan dan sedang diadakan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Berikut tampilan menu pemilihan penyedia :

| Tanggal        | Lokasi   | Nama   | Bidang/Sub Bidang  |
|----------------|--|--|--|
| 05<br>JUL.2023 | KSO TPK<br>Koja  | TENDER ULANG PENGADAAN 3 (TIGA) UNIT<br>QUAY CONTAINER CRANE KSO TPK KOJA<br>(0400000327)  | (B.20.19) PENGADAAN BARANG dan JASA   Bidang sub bidang pemasok barang<br>lainnya.   Crane Manufacture,<br>(B.21) PENGADAAN BARANG dan JASA   Pabrikasi / Principal        |
| 03<br>JUL.2023 | PT Terminal<br>Petikemas<br>Surabaya   | PENGADAAN 14 (EMPAT BELAS) UNIT<br>ELECTRIC RUBBER TYRED GANTRY (E-RTG)<br>CRANE UNTUK PT TERMINAL PETIKEMAS<br>SURABAYA (AG-2023-0000447) | (B.21) PENGADAAN BARANG dan JASA   Pabrikasi / Principal ,<br>(B.20.19) PENGADAAN BARANG dan JASA   Bidang sub bidang pemasok barang<br>lainnya.   Crane Manufacture       |
| 22<br>JUN.2023 | Dermaga<br>Umum<br>Tanjung<br>Wangi PT<br>Pelabuhan<br>Indonesia<br>(Persero) di<br>Banyuwangi | PERKUATAN DERMAGA PELABUHAN<br>TANJUNG WANGI (0400000329)  | (S1001) JASA PEMBORONGAN   Jasa Pelaksana Konstruksi   Bangunan Sipil   Jasa<br>Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya<br>Air Lainnya |

Gambar 4.6 Tampilan Menu Paket Lelang *Secure* (2023)

### 3. Registrasi

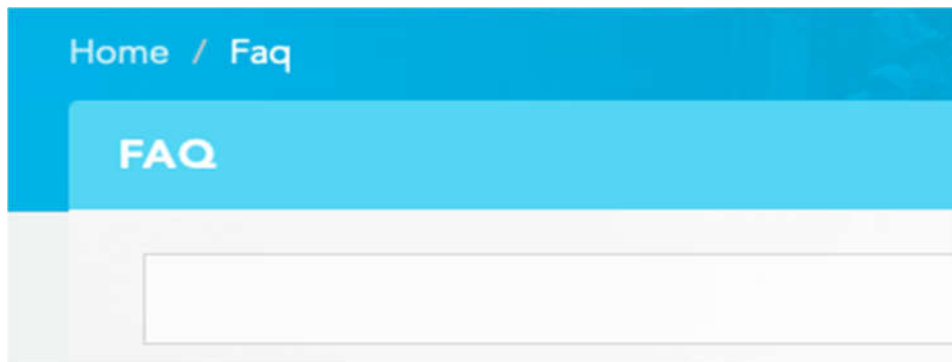
Menu *registrasi* ini bertujuan untuk mendaftarkan penyedia atau mitra kerja. Penyedia atau mitra kerja perlu melakukan *registrasi* perusahaannya di aplikasi *Secure* apabila berencana untuk mengikuti proses tender di PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Terdapat formulir dan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh penyedia atau mitra kerja agar berhasil mendaftar. Berikut tampilan menu *registrasi* :

| REGISTRASI   |   |
|--|---|
| <p><b>Syarat dan Ketentuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk menjadi Pelaku Usaha Terseleksi (PUT) PT Pelabuhan Indonesia, harus mendaftar melalui Sistem SECURE</li> <li>2. Form pendaftaran Pelaku Usaha Terseleksi (PUT) dibawah ini digunakan untuk Calon Peserta yang <b>BELUM MENJADI DAFTAR REKANAN PERUSAHAAN PT Pelabuhan Indonesia</b></li> <li>3. Pendaftaran Pelaku Usaha Terseleksi (PUT) melalui Form Pendaftaran ini <b>HARUS MELAKUKAN VALIDASI DOKUMEN FISIK</b> secara langsung pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa atau Divisi Pengadaan Barang dan Jasa.</li> <li>4. Username dan Password Sistem SECURE akan dikirimkan ke email yang didaftarkan setelah calon Pelaku Usaha Terseleksi (PUT) <b>MELAKUKAN VALIDASI DOKUMEN</b></li> <li>5. Apabila dalam tempo 30 Hari Sejak tanggal Pendaftaran Calon Pelaku Usaha Terseleksi (PUT) tidak melakukan validasi, maka <b>PENDAFTARAN AKAN DIANGGAP BATAL</b></li> </ol> <p>Untuk keterangan lebih lanjut mengenai Syarat dan Ketentuan pada Sistem SECURE PT Pelabuhan Indonesia , silahkan download file berikut: <a href="#">Prosedur Pendaftaran</a>.<br/>Kemudian lanjutkan dengan mengisi form berikut jika Anda sudah mengerti prosedur pendaftarannya</p> | <h2>Nomor Registrasi</h2> <p>Setelah pendaftaran dan sebelum Validasi, harap melakukan entry dan upload data anda dengan mengisi nomor registrasi dibawah dan klik login</p> <p>Nomor Registrasi * <input type="text"/></p> <p><b>LOGIN</b></p> |

Gambar 4.7 Tampilan Menu Registrasi *Secure* (2023)

#### 4. FAQ

Terdapat menu FAQ (*Frequently Asked Questions*) pada aplikasi *Secure* yang berfungsi untuk menampung pertanyaan dari penyedia atau rekanan yang sering ditanyakan. Berikut tampilan menu FAQ.



Gambar 4.8 Tampilan Menu FAQ *Secure* (2023)

#### 5. Download

Pada menu Download terdapat beberapa pilihan menu, yang pertama Petunjuk Penggunaan Aplikasi yang berisi tata cara pendaftaran penyedia atau rekanan di aplikasi *Secure*. Kedua, Surat Pernyataan yang berisi pernyataan dari penyedia atau rekanan bahwa dokumen yang dilampirkan pada saat proses pendaftaran sudah benar dan sesuai. Ketiga, dalam menu Peraturan Direksi terdapat pedoman pengadaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Keempat, Rencana Umum Pengadaan (RUP) berisi informasi tentang rekapitulasi data rencana umum pengadaan tahun 2023 di PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Berikut penampilan menu *Download* :



Gambar 4.9 Tampilan Menu *Download Secure* (2023)

**USER MANUAL**  
**REGISTRASI PELAKU USAHA**  
**PT PELABUHAN INDONESIA**  
**(PERSERO)**  
**PADA APLIKASI SECURE PELINDO**

Gambar 4.10 Tampilan menu petunjuk penggunaan aplikasi *Secure* (2023)

|  |                            |
|--|----------------------------|
| 2. Surat Pernyataan Tidak Termasuk Dalam Daftar Hitam  | Contoh Lampiran Formulir B |
| KEPALA SURAT (KOP SURAT)<br>PERUSAHAAN PESERTA/PENYEDIA BARANG DAN JASA                            |                            |
| SURAT PERNYATAAN TIDAK TERMASUK DALAM DAFTAR HITAM   |                            |
| Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun..... ,<br>yang bertanda tangan di bawah ini : |                            |

Gambar 4.11 Tampilan menu Surat Pernyataan *Secure* (2023)

PERATURAN DIREKSI  
PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)  
NOMOR HK.01/24/1/1/ADPG/UTMA/PLND-22  
TANGGAL 24 JANUARI 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)

Gambar 4.12 Tampilan menu Peraturan Direksi *Secure* (2023)

**REKAPITULASI DATA RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN 2023  
PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)**

| Unit Kerja   | Jenis Biaya | Jenis Pengadaan  | Estimasi Nilai HPS/OE (Rp) | Total Nilai HPS/OE (Rp) |
|--------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| Kantor Pusat | OPEX        | Barang           | Rp 1.000.000.000           | Rp 2.410.198.459.909    |
|              |             | Jasa Konstruksi  | Rp -                       |                         |
|              |             | Jasa Konsultansi | Rp 123.086.843.639         |                         |
|              |             | Jasa Lainnya     | Rp 2.286.111.616.270       |                         |
|              | CAPEX       | Barang           | Rp 798.500.000.000         | Rp 2.827.130.144.000    |
|              |             | Jasa Konstruksi  | Rp 1.914.858.565.000       |                         |
|              |             | Jasa Konsultansi | Rp 9.742.800.000           |                         |
|              |             | Jasa Lainnya     | Rp 104.028.779.000         |                         |

**Gambar 4.13 Tampilan menu Rencana Umum Pengadaan *Secure* (2023)**

6. Hubungi Kami

Menu Hubungi Kami pada aplikasi *Secure* berfungsi apabila penyedia atau rekanan mengalami kesulitan pada saat pendaftaran dapat meminta bantuan kepada tim penyediaan produk dan layanan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Selain itu pada menu ini, penyedia atau rekanan dapat mengirim kritik dan saran. Berikut penampilan menu Hubungi Kami pada aplikasi *Secure* :

Home / Hubungi Kami

**HUBUNGI KAMI**

Hubungi Kami

Nama perusahaan : \*

E-mail : \*

Contact Person : \*

Subyek : \*

Pesan : \*

Ketik kode yang ditampilkan : \*

SIMPAN RESET

**Gambar 4.14 Tampilan menu Hubungi Kami *Secure* (2023)**



## **4.2 Hasil Penelitian**

Studi ini mengulas evaluasi mengenai analisa efektivitas penyediaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) melalui aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Data untuk mengukur efektivitas (*E-procurement*) melalui aplikasi *Secure* di perusahaan diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap beberapa informan yang ditunjuk. Peneliti memanfaatkan indikator efektivitas menurut Duncan, yang melibatkan pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Selain itu, indikator pengelolaan kinerja perusahaan yang dijelaskan dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) juga digunakan dalam penelitian ini.

### **4.2.1 Tingkat Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik (*E-procurement*) melalui Aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero)**

Wawancara dan pengamatan terhadap informan yang ditunjuk menghasilkan data, dimana peneliti menggunakan indikator efektivitas menurut Duncan, yakni pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi untuk mengukur efektivitas pelaksanaan *E-procurement* melalui aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Pencapaian tujuan melibatkan semua usaha dalam meraih sasaran yang dianggap sebagai sebuah proses. Langkah-langkah eksekusi diperlukan untuk memastikan pencapaian akhir yang diinginkan. Pencapaian tujuan melibatkan beberapa aspek, seperti waktu yang ditetapkan dan sasaran khusus.

Satu dari niat dalam pelaksanaan penyediaan produk dan layanan melalui metode elektronik (*E-procurement*) adalah mencapai transparansi dan akuntabilitas. Dalam aplikasi *Secure*, transparansi berarti bahwa semua informasi terkait dengan proses penyediaan barang dan jasa, persyaratan teknis, proses evaluasi, dan penetapan calon penyedia, dapat diakses langsung oleh semua peserta penyedia atau rekanan yang berminat. Transparansi menjamin informasi yang terdapat pada aplikasi *Secure* sudah tepat dan sesuai untuk para penyedia barang dan jasa, sehingga memudahkan penyedia barang

dan jasa untuk mengontrol pengadaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Akuntabel berarti bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang berlaku di PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Keterbukaan dan transparansi perusahaan semakin menjadi kebutuhan penting bagi semua perusahaan di era digital saat ini. Sebagai elemen yang signifikansi dari transparansi ini ialah kejelasan dalam proses lelang, baik untuk barang maupun jasa. Penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) selain hemat anggaran, dinilai lebih transparan dan akuntabilitasnya lebih tinggi, sehingga menangkalkan terjadinya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Penerapan *E-procurement* membatasi keterlibatan langsung tenaga kerja dalam proses menerima, mencatat dan mendistribusikan permintaan lelang yang dapat mengarah pada praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Proses lelang diatur dalam sistem yang transparan dan akuntabel, serta menghindari pertemuan langsung antara panitia penyelenggara dan penyedia barang dan jasa.

Dalam sesi wawancara bersama *SSC Lead* PT Pelabuhan Indonesia (Persero), disebutkan bahwa segala pengumuman telah diunggah secara tepat waktu pada aplikasi *Secure*. Penyampaian pengumuman ini dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh panitia penyediaan produk dan layanan yang bertugas di bagian *SSC Procurement* PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dalam hal ini *SSC Lead* yang didukung oleh bagian *Procurement Service Head* dimana bagian tersebut dibantu perannya oleh *Source to Contract Team Lead 1* dan *Source to Contract Team Lead 2*, serta *Procure to Order Team Lead*. Aplikasi *Secure* digunakan untuk mengumumkan seluruh paket pengadaan keseluruhan penyedia atau rekanan di seluruh Indonesia. Semua penyedia barang dan jasa atau rekanan dapat melihat paket lelang yang ditenderkan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Hal tersebut juga disampaikan oleh *Procurement Service Head* yang menjelaskan bahwa pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) melalui aplikasi *Secure* telah dilakukan dengan

terbuka sejak pengumuman sampai hasil penetapan pemenang secara digital dan terbuka. Implementasi (*E-procurement*) melalui aplikasi *Secure* ini disosialisasikan secara terbuka oleh Tim *SSC Procurement* PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Pernyataan dari *Procurement Service Head*, bahwa ada sosialisasi melalui *workshop inhouse*. Saat ini proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) melalui aplikasi *Secure* dalam tahap implementasi atau penerapan.

Hasil wawancara dengan *SSC Lead* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menunjukkan penyelenggaran penyediaan produk dan layanan secara elektronik (*E-procurement*) melalui aplikasi *Secure* menggunakan prinsip akuntabel yang artinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dijelaskan pula oleh *Procurement Service Head* bahwa penerapan aplikasi *Secure* menggunakan prinsip akuntabel, yang dapat dipertanggungjawabkan setiap prosesnya karena sewaktu-waktu akan ada audit. Audit ialah proses pengendalian dan pemantauan pelaksanaan penyediaan produk dan layanan secara elektronik (*E-procurement*) melalui aplikasi *Secure*, yang dilakukan oleh tim khusus bernama Satuan Pengawas Intern (SPI).

Sasaran lain dari implementasi *E-procurement* melalui aplikasi *Secure* adalah menciptakan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Terjadinya persaingan yang sehat antar pelaku usaha mendukung iklim investasi yang kondusif secara nasional. Dengan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, adil dan partisipatif mendukung persaingan usaha yang semakin sehat disetiap wilayah dimana pengadaan barang dan jasa tersebut dilaksanakan. Secara umum sistem *E-procurement* melalui aplikasi *Secure* menuntut penyedia barang dan jasa berlomba untuk melakukan efisiensi, sementara disisi lain juga menghasilkan output yang berkualitas. Dengan terjadinya persaingan yang sehat antar pelaku usaha, maka *E-procurement* melalui aplikasi *Secure* juga mampu memberikan peluang kerja dan usaha bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pelaku bisnis lokal tanpa diskriminasi sehingga pasar bisa hidup.

Hasil wawancara dengan *SSC Lead* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menjelaskan bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah mencapai akses pasar dan persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan penyediaan produk dan layanan secara elektronik (*E-procurement*) melalui aplikasi *Secure*. Dalam menciptakan akses pasar, implementasi *E-procurement* melalui aplikasi *Secure* banyak melibatkan aktor-aktor pasar terkait, hal ini dikarenakan diumumkan secara terbuka.

Pernyataan yang sama dikemukakan oleh *Procurement Service Head*, bahwa mereka telah melibatkan pelaksana pasar. Namun, para pelaksana pasar juga diminta untuk berperan aktif memantau situs web dan aplikasi *Secure*. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam mengakses pasar, bahkan mendorong partisipasi usaha kecil menengah (UKM) atau usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam proses penyediaan produk dan layanan di perusahaan tersebut. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) juga membuka kesempatan bagi penyedia produk dan layanan untuk menampilkan produk mereka di katalog nasional.

Salah satu tujuan dari penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) melalui aplikasi *Secure* adalah meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan. Efisiensi diartikan sebagai melakukan tugas dengan benar dan akurat tanpa pemborosan waktu, tenaga, dan uang. Dalam konteks ini, proses pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan penggunaan dana dan sumber daya yang minimal mungkin untuk mencapai kualitas dan tujuan dalam jangka waktu yang ditentukan, atau dengan menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan tujuan dengan kualitas maksimal.

*SSC Lead* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mengemukakan tingkat efisiensi pada proses penyediaan produk dan layanan secara elektronik (*E-procurement*) melalui aplikasi *Secure* telah menggunakan dana dan sumber daya yang minimal untuk mencapai kualitas dan tujuan yang tepat dalam waktu yang telah ditentukan. Melalui penggunaan dana dalam proses penyediaan produk dan layanan secara elektronik (*E-procurement*) melalui

aplikasi *Secure*, hasil dan tujuan telah berhasil dicapai dengan kualitas yang maksimal.

*Procurement Service Head* menyatakan bahwa secara keseluruhan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui aplikasi *Secure* sudah cukup efisien karena syarat dan kententuannya mengacu pada Peraturan Direksi tanggal 1 Desember 2022 Nomor: HK.01/1/12/1/ADPG/UTMA/PLND-22 yang mengatur tentang pedoman pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Jadi untuk tingkat efisiensi pengadaan barang jasa sudah baik. Dari sisi waktu dinilai efisien karena bisa dilihat intensitas proses pengadaannya, dikerjakan dimana pun berada bahkan proses pengadaan barang dan jasa tidak melihat hari kerja tetapi hari kalender. Kadang hari libur pun bisa dilakukan proses pengadaan barang dan jasa.

Integrasi merupakan ukuran kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, membangun konsensus dan berkomunikasi dengan organisasi lain. Integrasi melibatkan proses sosialisasi. Integrasi berfokus pada upaya organisasi untuk melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak terkait, yang merupakan subjek dari seluruh tujuan kerja yang telah ditetapkan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Pada penelitian ini, rujukan berkaitan dengan proses sosialisasi, yaitu kemampuan tenaga kerja yang mengoperasikan *E-procurement* untuk melakukan sosialisasi aplikasi *Secure* kepada seluruh organisasi terkait di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Berdasarkan hasil wawancara dengan *SSC Lead* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mengatakan bahwa sosialisasi penggunaan aplikasi *Secure* telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal yang sama juga disampaikan oleh *Procurement Service Head* bahwa sosialisasi penggunaan aplikasi *Secure* sudah dilakukan oleh semua member *SSC Procurement* PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Adaptasi merupakan perilaku organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar organisasi tersebut. Adaptasi yang menitikberatkan pada seberapa baik tenaga kerja dalam organisasi tersebut

mampu menyesuaikan diri dalam mengimplementasi sistem pada proses penyediaan produk dan layanan. Dalam studi ini, dilakukan penyesuaian atau adaptasi tenaga kerja terhadap implementasi sistem dalam proses penyediaan produk dan layanan, yaitu implementasi *E-procurement* melalui aplikasi *Secure*. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melakukan evaluasi terhadap adaptasi tenaga kerja dan kesiapan infrastruktur (teknologi) guna memastikan bahwa penerapan sistem baru pada proses penyediaan produk dan layanan sesuai dengan target yang disetujui.

Hasil wawancara dengan *SSC Lead* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menunjukkan bahwa penyesuaian terhadap sistem baru pada penyediaan perangkat kerja (penyiapan infrastruktur dan sumber daya manusia) dalam implementasi *E-procurement* di Pelabuhan Indonesia (Persero) sudah berjalan dengan sangat baik. Pelaksana *E-procurement* di Pelabuhan Indonesia (Persero) telah dijalankan sesuai dengan ketetapan Direksi tanggal 1 Desember 2022 Nomor: HK.01/1/12/1/ADPG/UTMA/PLND-22 yang menguraikan pedoman penyediaan produk dan layanan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

#### **4.2.2 Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Melalui Aplikasi *Secure* Di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sudah Berjalan Efektif Sesuai Peraturan Yang Berlaku**

Dalam hal ini peneliti juga mempertimbangkan indikator pengelolaan kinerja perusahaan yang dijabarkan dalam Pedoman Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Ketetapan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/16/12/1/PRKJ/UTMA/PLND-21 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2021 mengenai Panduan Pengelolaan Kinerja Perusahaan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mencakup aspek pengelolaan yaitu KPI (*Key Performance Indicators*) Unit. KPI (*Key Performance Indicators*) Unit merupakan pengukuran penilaian yang dimiliki oleh masing-masing unit sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam lingkup yang dipimpinnya. Ketetapan Direksi PT Pelabuhan Indonesia

(Persero) Nomor: HK.01/5/12/1/KSMG/UTMA/PLND-22 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2022 mengenai Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Wewenang Bidang Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang dan Jasa Pada *Shared Services Center (SSC)* mengatur standard ukuran kendali penuh atas kualitas layanan serta untuk memastikan seberapa besar ukuran pengeluaran yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam fungsi layanannya yang digunakan adalah *Service Level Agreement (SLA)* yang meliputi:

1. Proses pengumpulan data penilaian kinerja penyedia selama 14 hari kerja.
2. Proses pembuatan laporan penilaian kinerja penyedia selama sekali dalam enam bulan.
3. Proses registrasi penyedia selama 5 hari kerja.
4. Proses pengenaan *blacklist* penyedia selama 3 hari kerja.
5. Proses registrasi material atau jasa selama 3 hari kerja.
6. Proses penghentian *e-Catalogue* selama 5 hari kerja.
7. Pembuatan laporan rutin proses pengadaan barang dan jasa selama sekali dalam enam bulan.
8. Persiapan pengadaan dengan melakukan pengajuan permintaan dan verifikasi dokumen selama 3 hari kerja.
9. Pembuatan paket lelang di aplikasi *Secure* selama 6 hari kerja.
10. Pelaksanaan tender pekerjaan selama 20 hari kerja.
11. Undangan rapat pemberian penjelasan ke penyedia sampai terbitnya surat penetapan pelaksanaan pekerjaan selama 15 hari kerja.
12. Pembuatan surat perjanjian atau surat perintah kerja (SPK) sampai proses penandatanganannya selama 14 hari kerja.

### **4.3 Pembahasan**

Peneliti membuat kesimpulan dengan menggunakan 2 (dua) indikator untuk mengukur analisa efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) melalui aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai berikut:

#### **4.3.1 Tingkat Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-procurement*) melalui Aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero)**

Tingkat efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) melalui aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sudah efektif. Terbukti bahwa transparansi telah berhasil dicapai, mulai dari ketersediaan jadwal lelang hingga hasil penetapan pemenang lelang. Rincian lelang dan realisasi anggaran dapat diakses secara langsung melalui *website* dan aplikasi *Secure*. Hal ini menandakan bahwa seluruh informasi lelang di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah dibuka secara umum untuk peserta yang ingin mengikuti proses penyediaan barang dan jasa. Untuk tujuan akuntabilitas, dibuat laporan kinerja penyediaan produk dan layanan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) setiap akhir tahun. Laporan ini sebagai bukti tanggung jawab atas seluruh proses lelang yang dilakukan setiap tahunnya. Terciptanya akses pasar yang adil dan kompetisi bisnis yang seimbang, terbukti dari pelaksanaan *E-procurement* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melibatkan banyak pelaku pasar, termasuk pihak penyedia dari sebuah CV (Commanditaire Vennootschap atau Perseroan Komanditer) dan PT (Perseroan Terbatas). Selanjutnya implementasi *E-procurement* melalui aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dapat diintegrasikan dengan organisasi atau perusahaan lain yang terkait. Maksud dari hal ini adalah agar selama penerapan *E-procurement* melalui aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero), seluruh anggota *SSC Procurement* dapat meningkatkan kesadaran, mengembangkan konsensus, dan berkomunikasi dengan berbagai organisasi lain secara bersama-sama. Selama proses implementasi *E-procurement*, *Member SSC Procurement* yang ada di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mampu menyesuaikan diri dengan penggunaan aplikasi *Secure*. Hal ini terbukti dari semua *Member SSC Procurement* yang mengikuti pelatihan atau pembelajaran yang telah dijadwalkan oleh divisi terkait. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah menyediakan fasilitas yang mendukung penerapan aplikasi *Secure*, hal ini dibuktikan dengan adanya fasilitasnya meliputi ruang



pelayanan, gedung layanan, ruang negosiasi, ruang verifikasi, ruang registrasi, ruang server dan ruang pelatihan. Selain itu, ada berbagai perangkat keras yang mendukung implementasi *E-procurement* seperti komputer, laptop, *scanner printer*, *wifi* atau *access point*, lemari, filing kabinet, meja, kursi, dan AC.

#### **4.3.2 Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Melalui Aplikasi *Secure* Di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sudah Berjalan Efektif Sesuai Peraturan Yang Berlaku**

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) melalui aplikasi *Secure* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sudah berjalan efektif sesuai dengan Ketetapan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/16/12/1/PRKJ/UTMA/PLND-21 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2021. Hal ini terbukti berdasarkan *Service Level Agreement (SLA)* standard pelaksanaan tender pekerjaan selama 20 hari kerja, sedangkan *Source to Contract Team Member* sebagai pelaksana tender mampu melaksanakan proses tender pekerjaan selama 9 hari kerja. Setiap proses penyediaan produk dan layanan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tidak memerlukan waktu yang sangat lama karena prosesnya secara elektronik melalui aplikasi *Secure*.

#### **4.4 Kendala dan Cara Mengatasi**

Dalam proses penyediaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tidak selalu berjalan dengan lancar, terdapat beberapa kendala yang dihadapi pelaksana tender pekerjaan. Berikut beberapa kendala yang dihadapi pelaksana tender:

1. Tidak tercapainya efisiensi waktu pada proses penyediaan barang dan jasa melalui aplikasi *Secure*. Hal ini dikarenakan pihak penyedia belum terdaftar sebagai rekanan pada aplikasi *Secure*. *Source to Contract Team Member* sebagai pelaksana terpaksa harus membatalkan tender dan memberi waktu

tambahan kepada penyedia untuk mendaftarkan perusahaannya sebagai rekanan. Hal tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 5 hari kerja.

2. Kendala negosiasi harga dimana penyedia tidak sepakat untuk menurunkan harga penawaran, sehingga tidak ada efisiensi biaya. Hal ini karena penyedia merasa sudah memberikan harga terbaik dan menjamin kualitas pekerjaannya. Dalam hal ini *Source to Contract Team Member* menyerahkan segala bentuk keputusan kepada *SSC Lead* untuk menetapkan apakah proses tender pekerjaan tetap berjalan sampai menemukan pemenang atau harus dibatalkan karena tidak tercapai kesepakatan harga.
3. Seluruh proses penyediaan barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menggunakan aplikasi *Secure*. Aplikasi yang berbasis website ini ada kalanya mengalami lonjakan *traffic* sehingga mengalami *server down*. Pada saat mengalami gangguan seperti itu, sebagai pengguna aplikasi *Secure* baik penyelenggara maupun penyedia tidak dapat mengakses aplikasi *Secure* dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Untuk mengatasi kendala tersebut agar tidak terjadi berulang-ulang, maka perlu dilakukan pemeliharaan rutin oleh tim *IT (Information and Technology)* pada aplikasi *Secure*.